

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*) telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik (Soimah, 2014).

Selain itu, dalam Pemerintahan yang baik diharuskan dapat mengelola sumber daya yang ada di negara, salah satunya adalah keuangan. Pemerintahan dapat dikatakan baik apabila terlaksananya salah satu prinsip-prinsip *Good Governance* yaitu adanya Akuntabilitas Publik dan Transparansi yang berdampak pada berbagai aspek terutama aspek akuntansi. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan,

baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Yosefrinaldi, 2013)..

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan suatu asersi atau pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah kepada pihak lain yaitu pemangku kepentingan yang ada agar mengetahui tentang kondisi keuangan pemerintah daerah tersebut. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Bagi Pemerintah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Indikator yang mencerminkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Adhi dan Suhardjo, 2013).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan

keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka laporan keuangan tersebut harus memenuhi karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni: 1). Relevan: Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini. 2). Andal: Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian uang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. 3). Dapat Dibandingkan: Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. 4). Dapat Dipahami: Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, Wali Kota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat lima opini yang diberikan BPK, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Adapun fenomena dalam pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Seperti berikut:

Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil yang baru saja menerima hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengaku menerima hasil yang sudah ditetapkan lembaga negara tersebut. Opini

Wajar Dengan Pengecualian (WDP) itu tidak membuatnya patah semangat. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan BPK adalah pendataan aset pemerintah yang belum tuntas. Pada pemeriksaan tahun lalu, BPK menetapkan ada sejumlah aset senilai Rp 11 triliun yang harus didata ulang. Dalam kurun waktu hanya setahun, pemerintah kota telah menyelesaikan sekitar 85% atau senilai kurang lebih Rp 9 triliun. Ia menjelaskan, masih ada warisan masalah aset-aset yang harus dituntaskan. Ridwan Kamil menegaskan, pihaknya hanya butuh lebih banyak waktu. Namun ia optimis, tahun ini sisa pekerjaannya akan tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tidak berkualitas dikarenakan laporan keuangan yang disajikan tidak relevan. (Pikiran Rakyat, Senin, 12 Juni 2017, 16:00 WIB)

Adapun tabel di bawah ini merupakan opini yang diberikan oleh BPK kepada Pemerintah Kota Bandung selama lima tahun terakhir:

Tabel 1.1
Opini Yang Diberikan BPK Pada Pemerintah Kota Bandung

Tahun	Opini BPK
2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Adapun fenomena lain yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan yaitu, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) berharap pemerintah memperbaiki

laporan keuangan untuk waktu selanjutnya. Permintaan itu secara khusus ditujukan BPK kepada Presiden Joko Widodo agar memerintahkan menteri keuangan dan menteri dalam negeri untuk memberikan pelatihan dan pendampingan pembuatan laporan keuangan terhadap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Ketua BPK Harry Azhar Azis mengungkapkan, laporan pemerintah sejak 2009-2014 masih belum meningkat dari predikat wajar dengan pengecualian (WDP). Pemicu belum adanya peningkatan laporan keuangan tersebut yaitu banyak laporan dibuat dibawah standar. Harry melanjutkan, masalah dalam pembuatan laporan keuangan tidak mengalami banyak perbedaan di tiap tahunnya. Mayoritas temuan adalah masih adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan, kewajaran harga, dan sistem pengendalian internal. Harry juga menegaskan, bisa saja adanya kesengajaan, ada kelalaian dari petugas yang mengelola keuangan negara, dan ada juga yang tidak paham dalam pengerjaannya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut tidak andal. (KOMPAS.com, Senin, 12 Oktober 2015, 13:38 WIB)

Dari fenomena-fenomena tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan pada pemerintah Kota Bandung mendapat opini wajar dengan pengecualian menurut BPK. Penyebab Kota Bandung mendapatkan opini wajar dengan pengecualian yaitu, karena pendataan aset pemerintah yang belum tuntas.

Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Hal itu

juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.

Hal yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi,. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan informasi atas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan informasi akuntansi yang akan digunakan manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi secara tepat waktu, relevan, akurat dan lengkap. Oleh karena itu dibutuhkan suatu teknologi sistem informasi (*Hardware* dan *Software*) untuk menyediakan informasi tersebut agar informasi yang dibutuhkan tersedia tepat waktu (Andriani, 2010:71)

Suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan jaringan. Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan data atau transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar, meminimalisasi terjadinya kesalahan, dan biaya pemrosesan lebih rendah. Namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana untuk mengimplementasikan teknologi informasi tersebut.

Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di suatu entitas belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini mungkin juga memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas pemerintah. (Indriasari dan Nahartyo, 2008).

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Adanya penggunaan teknologi informasi dan pengelolaan pemerintah, otomatis juga menuntut aparatur harus mengubah dalam menyelesaikan pekerjaannya dari semula manual menjadi terkomputerisasi (Hamzah, 2009).

Dengan adanya fasilitas jaringan sistem informasi akuntansi yang dirancang khusus untuk proses penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan jurnal, buku besar sampai kepada laporan keuangan semua telah tersistem dengan menggunakan komputerisasi, serta akan mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunannya. Dengan demikian diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi informasi yang diharapkan dan mampu meningkatkan kualitas hasil dan tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi yang diteliti oleh Trimo Sujadijaya (2017), Silviana dan Erwin Antoni (2014), Rahayu dan Manti Winda (2015), Dian Irma Diani (2014)
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang diteliti oleh Putriasri Pujanira dan Abdullah Taman (2017), Aziz Dzulfidya Azwar (2015), Hilda Berliana Nagari (2014), Rizal Pramudiarta (2015), Riedy Riandani (2017)
3. Peran Audit Internal yang diteliti oleh Lusi Novita Sari (2014), Dian Irma Diani (2014)
4. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan yang diteliti oleh Putriasri Pujanira dan Abdullah Taman (2017), Aziz Dzulfidya Azwar (2015), Hilda Berliana Nagari (2014), Aniftahudin (2016)
5. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diteliti oleh Putriasri Pujanira dan Abdullah Taman (2017), Nilam Sari (2016)
6. Kapasitas Sumber Daya Manusia yang diteliti oleh , Nilam Sari (2016), Melinda Ashari (2016), Lusi Novita Sari (2014)
7. Pengendalian Internal yang diteliti oleh Riedy Riandani (2017) , Rizal Pramudiarta (2015), Syara Rizky Aszura Talaohu (2016), Nilam Sari (2016)
8. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang diteliti oleh , Melinda Ashari (2016), Nilam Sari (2016), Rizal Pramudiarta (2015) dan Riedy Riandani (2017), Aniftahudin (2016)

9. Pemahaman Akuntansi yang diteliti oleh Nilam Sari (2016),
Aniftahudin (2016), Dian Irma Diani (2014)

Tabel 1.2

Hasil Penelitian Terdahulu
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

No	Peneliti	Tahun	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemahaman akuntansi	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	Kapasitas SDM	Penerapan SIA	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan	Kompetensi Sumber Daya Manusia	Peran Audit Internal	Penegndalian Internal
1	Riedy Riandani	2017	x	-	-	-	-	-	√	-	√
2	Syara Rizky Aszura Talaohu	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	√
3	Trimo Sujadijaya	2017	-	-	-	-	√	-	-	-	-
4	Silviana dan Erwin Antoni	2014	-	-	-	-	√	-	-	-	-
6	Rahayu dan Manti Winda	2015	-	-	-	-	√	-	-	-	-
7	Putriasri Pujanira dan Abdullah Taman	2017	-	-	√	-	-	√	√	-	-
8	Aziz Dzulfidya Azwar	2015	-	-	-	-	-	√	√	-	-

9	Hilda Berliana Nagari	2014	-	-	-	-	-	√	√	-	-
10	Lusi Novita Sari	2014	-	-	-	√	-	-	-	√	-
11	Aniftahudin	2016	√	√	-	-	-	√	-	-	-
12	Nilam Sari	2016	√	x	x	√	-	-	-	-	√
13	Melinda Ashari	2016	√	-	-	√	-	-	-	-	-
14	Rizal Pramudiarta	2015	x	-	-	-	-	-	√	-	√
15	Dian Irma Diani	2014	√	√	-	-	x		-	√	-

Keterangan :

Tanda √ : Berpengaruh

Tanda × : Tidak Berpengaruh

Tanda - : Tidak Meneliti

Alasan dalam pemilihan variabel karena penelitian tentang kualitas laporan keuangan telah banyak dilakukan tetapi hasil dari penelitian tidak memberikan hasil konsistensi yang signifikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian Aniftahudin (2016), Nilam Sari (2016), Melinda Ashari (2016) dan Dian Irma Diani (2014) menemukan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Rizal Pramudiarta (2015) dan Riedy Riandani (2017) menemukan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**”.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih adanya Pemerintah daerah yang laporan keuangannya tidak memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berkualitas.
2. Penyebab masih adanya laporan keuangan pemerintah yang tidak berkualitas yaitu adanya pendataan aset pemerintah yang belum tuntas dan pelanggaran terhadap perundang-undangan.
3. Dampak yang akan di timbulkan dari penyajian laporan keuangan yang tidak berkualitas yaitu akan adanya kekeliruan dalam pengambilan keputusan dan mendapat teguran dari BPK berupa opini yang bukan WTP.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.

3. Seberapa besar pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu secara teoritis dan secara praktis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1.1.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

1.1.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan manfaat bagi penulis, bagi perusahaan, maupun bagi pembaca pada umumnya. Adapun manfaat-manfaat yang dapat di ambil adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.

b. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran untuk perusahaan mengenai pentingnya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dalam mewujudkan kualitas laporan keuangan yang baik.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu, berbagi ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan serta untuk menjadikan bahan masukan dan informasi guna melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian ini pada waktu yang telah ditetapkan.